



RISALAH RAPAT

I. Pendahuluan :

A. Dasar Hukum :

- Surat undangan Ketua Umum Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Nomor : A-008/APPSI/I/2018 tanggal 10 Januari 2018.
- Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor : 090/417-Pem/2018 tanggal 21 Pebruari 2018.
- Surat Perintah Tugas Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Nomor : 090/85-Pem/2018 tanggal 20 Pebruari 2018.

B. Maksud dan Tujuan :

Menghadiri undangan Rapat Kerja Nasional APPSI, pada tanggal 21 s.d 23 Pebruari 2018 bertempat di Hotel Trans Luxury, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 289 Bandung - Jawa Barat.

II. Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Rapat Kerja Nasional APPSI Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 23 Pebruari 2018 bertempat di Hotel Trans Luxury, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 289 Bandung - Jawa Barat, dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri RI dan ditutup oleh Ketua Umum Dewan Pengurus APPSI.
2. Rapat Kerja Nasional APPSI dihadiri oleh Bapak Presiden RI beserta para Menteri Kabinet Kerja, 24 Gubernur, 6 Wakil Gubernur, 4 Sekretaris Daerah, pejabat pendamping dari masing-masing provinsi serta Dewan Pakar APPSI.
3. Tema Rapat Kerja Nasional APPSI Tahun 2018 adalah “Kerjasama Perdagangan Antar Daerah Untuk Penguatan Ekonomi Nasional”.

III. Hasil yang dicapai :

1. Dalam sambutan pembukaan Rakernas APPSI Tahun 2018, beberapa hal yang disampaikan Menteri Dalam Negeri RI antara lain :
 - a. Pemerintah daerah perlu membentuk kekuatan besar dengan menyatukan berbagai kekuatan yang ada dari masing-masing daerah melalui kerjasama dan bersinergi, dengan kerjasama dapat mengatasi hambatan lingkungan untuk mencapai tingkat produktivitas perdagangan antar daerah yang lebih tinggi.

- b. Kepala daerah diingatkan agar menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Konsolidasi dengan semua pihak perlu dilakukan agar penyelenggaraan Pilkada tetap aman dan berjalan dengan tertib.
 - c. Kepala daerah agar mencermati isu-isu atau gejala-gejala yang bisa timbul yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan jelang Pilkada, khususnya masa rawan konflik mulai bulan Juni, Juli hingga Agustus 2018.
2. Diskusi Panel dengan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan. Dalam diskusi ini Plt Sekjen Kemendagri menyampaikan bahwa kerjasama antar daerah masih belum menjadi prioritas setiap daerah, kerjasama antar daerah belum banyak disentuh karena selama ini pemerintah daerah masih fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Masukan dari para gubernur, perlunya penguatan ekonomi domestik untuk memperkuat ekonomi nasional, salah satunya melalui penguatan perdagangan antar daerah.
3. Ditandatanganinya Kesepakatan Bersama Gubernur seluruh Indonesia selaku anggota APPSI tentang Kerjasama Perdagangan Komoditas dan Produk Unggulan Antar Daerah. Kesepakatan Bersama ini diharapkan dapat menjadi dasar atau landasan untuk memperkuat perdagangan antar daerah serta memperkuat supply chain surplus-defisit masing-masing daerah dalam rangka menjaga tingkat inflasi.
4. Disahkannya Keputusan Rakernas APPSI Tahun 2018 sebagai berikut :
 - a. Program Kerja APPSI Tahun 2018, terdiri atas 10 (sepuluh) program kerja. Provinsi Banten pada bulan Mei 2018 dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan Seminar tentang Penguatan Komitmen Membangun Pemerintahan yang Baik Dalam Rangka Menjawab Tantangan Masa Depan.
 - b. Kenaikan Uang Iuran Tahunan Anggota APPSI, penentuan besaran uang iuran tahunan disesuaikan dengan besaran APBD masing-masing provinsi. Untuk Provinsi Banten, semula Rp. 100 juta per tahun naik menjadi Rp. 150 juta per tahun.
 - c. Rekomendasi kepada Pemerintah, terdiri atas 8 (delapan) hal.
5. Arahan Bapak Presiden RI dengan menekankan pada beberapa hal, antara lain :
 - a. Presiden meminta seluruh kepala daerah untuk menyederhanakan prosedur dan proses terkait investasi dan ekspor, sebab salah satu penyebab utama masih rendahnya pengembangan investasi di tanah air adalah regulasi dan persyaratan yang berbelit-belit.
 - b. Untuk pertama kali dalam 20 tahun, Indonesia mendapatkan predikat layak investasi dari 3 (tiga) lembaga sekaligus, dengan nilai BB dari fitch rating. Investasi Indonesia naik menjadi 11,1 persen, sedangkan Malaysia turun 21 persen.
 - c. Integrasi sistem perizinan, integrasi ini harus segera terlaksana di pusat maupun di daerah selambatnya Maret 2018 agar proses perizinan lebih sederhana dan akuntabel.
 - d. Potong izin rekomendasi dan kuatkan dukungan pada sistem single submission.

- e. Kepala daerah harus segera menindaklanjuti data produksi padi dengan tepat dan benar.
- f. Investasi, infrastruktur dan SDM sangat penting, untuk itu harus segera dituntaskan.
- g. Jangan kebanyakan program dan dibagi-bagi merata pada semua dinas. Fokus pada program prioritas sesuai visi dan misi kepala daerah. Misalnya tahun ini 60 persen untuk infrastruktur, tahun berikutnya 60 persen untuk SDM.
- h. Buatlah aplikasi sistem hubungan pusat dan daerah, targetkan satu setengah bulan harus tuntas.
- i. Pertumbuhan ekonomi nasional sangat tergantung dengan pertumbuhan ekonomi daerah.
- j. Presiden meminta kepala daerah untuk menjaga kondusifitas daerah selama proses Pilkada Tahun 2018.

IV. Kesimpulan :

- Rapat Kerja Nasional APPSI Tahun 2018 di Bandung - Jawa Barat berjalan dengan baik, hasil Rakernas tersebut dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan APPSI serta sebagai masukan kebijakan kepada Pemerintah Pusat.

Demikian laporan hasil perjalanan dinas yang dapat kami sampaikan, untuk menjadi bahan.

NOTULIS

ENDANG MULYANA, S.Sos
NIP. 19721010 199403 1 008

